

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang**

Perbaikan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat merupakan tujuan utama pembangunan ekonomi di banyak negara terutama di negara sedang berkembang. Pembangunan ekonomi merupakan salah satu jawaban yang seakan-akan menjadi kunci keberhasilan bagi suatu negara untuk memperbaiki dan meningkatkan taraf hidup warga negaranya. Oleh sebab itu, pembahasan-pembahasan masalah pembangunan banyak menaruh perhatian yang lebih besar pada nasib yang dihadapi oleh sebagian besar atau 2/3 penduduk dunia yang berada di negara-negara yang sedang berkembang. Pandangan ini sesuai dengan dimensi perubahan paradigma pembangunan yang berkembang dewasa ini yang lebih banyak menaruh perhatian kepada persoalan-persoalan mengatasi keterbelakangan misalnya tingkat hidup yang rendah, pengangguran, kemiskinan, dan ketimpangan yang pada umumnya dialami oleh negara-negara sedang berkembang (Suryana, 2000: 1).

Indonesia yang merupakan salah satu negara sedang berkembang yang sudah sejak lama memberikan perhatian yang besar terhadap upaya mencapai masyarakat yang adil, makmur dan sejahtera. Dalam rangka mewujudkan masyarakat yang adil, makmur dan sejahtera ini, pemerintah secara terus menerus telah menetapkan arah kebijakan pembangunan nasional. Berbagai kebijakan pembangunan ekonomi telah banyak dibuat dan diimplementasikan guna memperbaiki dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat tersebut secara berkesinambungan. Salah satu diantaranya adalah kebijakan penanggulangan kemiskinan dan ketimpangan distribusi pendapatan yang merupakan

inti dari semua masalah pembangunan ekonomi dan merupakan tujuan utama kebijakan pembangunan ekonomi banyak negara sedang berkembang (Todaro, 2006: 232).

Keseriusan pemerintah Indonesia dalam penanggulangan kemiskinan dan ketimpangan distribusi pendapatan ini terlihat dengan dikeluarkannya Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 124 Tahun 2001 tentang Pembentukan Komite Penanggulangan Kemiskinan (KPK) dan diterbitkannya Dokumen Interim Strategi Penanggulangan Kemiskinan Nasional pada tahun 2002. Dalam perkembangannya program penanggulangan kemiskinan dan ketimpangan distribusi pendapatan ini bisa dikatakan cukup berhasil. Hal ini terlihat dari adanya penurunan jumlah penduduk miskin dari 36,10 juta orang (16,66 persen) pada tahun 2004 menjadi 34,97 juta orang (15,42 persen) pada tahun 2008. Jelasnya terlihat pada tabel 1.1 berikut ini:

**Tabel 1.1**  
**Perkembangan Kemiskinan di Indonesia tahun 2004 – 2008**

| Tahun | Presentase penduduk miskin<br>(dalam persen) |       |             | Jumlah Penduduk miskin<br>(dalam juta orang) |       |             |
|-------|--|-------|-------------|--|-------|-------------|
|       | Kota   | Desa  | Kota + Desa | Kota   | Desa  | Kota + Desa |
| 2004  | 12,13  | 20,11 | 16,66       | 11,40  | 24,80 | 36,10       |
| 2005  | 11,68  | 19,98 | 15,97       | 12,40  | 22,70 | 35,10       |
| 2006  | 13,47  | 21,81 | 17,75       | 14,49  | 24,81 | 39,30       |
| 2007  | 12,52  | 20,37 | 16,58       | 13,56  | 23,60 | 37,16       |
| 2008  | 11,65  | 18,93 | 15,42       | 12,77  | 22,19 | 34,97       |

Sumber: BPS, Statistik Indonesia (Susenas) ; diolah

Selain itu, berdasarkan tabel 1.1 dapat dilihat perbandingan penduduk desa dan kota yang miskin dari tahun 2002 sampai dengan 2008 sangat berbeda. Laju perkembangan penduduk miskin di desa maupun di kota mengalami keadaan naik turun dalam perkembangan dari tahun 2002 sampai tahun 2008. Selain itu juga, tingkat kemiskinan banyak terdapat pada masyarakat pedesaan. Ini cukup beralasan karena mayoritas penduduk Indonesia yang tinggal di pedesaan bermatapencaharian sebagai

petani sehingga, hasilnya hanya untuk dikonsumsi dan pemenuhan kehidupan sehari-hari. Ini berbeda dengan di kota yang penduduknya berrmatapencarian beranekaragam dan mereka berorientasi bukan hanya pada pemenuhan kebutuhan melainkan sebagai gaya hidup.

Rata-rata pengeluaran per kapita per bulan yang dikeluarkan oleh BPS guna melihat garis kemiskinan antara di desa maupun di kota berbeda. Garis kemiskinan ini sendiri melihat besar kecilnya jumlah penduduk miskin. Secara keseluruhan garis kemiskinan Indonesia dari tahun ke tahun mengalami kenaikan. Yang di gunakan untuk mengukur garis kemiskinan ini adalah kebutuhan makanan 2.100 kalori per hari dan kebutuhan nonmakanan, seperti pendidikan, kesehatan, dan transportasi.

Dari tahun 2006 sampai dengan 2008 garis kemiskinan di Indonesia mengalami kenaikan ini didasarkan pada perubahan harga dan kenaikan harga-harga kebutuhan pokok. Seperti yang terlihat pada tabel 1.2 pada tahun 2006 garis kemiskinan Indonesia sebesar Rp. 151.997 dan meningkat menjadi Rp. 182.636 pada tahun 2008. Ini juga berpengaruh pada garis kemiskinan perkotaan dan pedesaan. Daerah pedesaan sendiri memiliki garis kemiskinan jauh lebih kecil dari daerah perkotaan. Tahun 2006 garis kemiskinan kota sebesar Rp. 174.290 sedangkan desa sebesar Rp. 130.584 meningkat pada tahun 2008 di kota sebesar Rp. 204.896 dan desa sebesar Rp. 161.636.

**Tabel 1.2**  
**Garis Kemiskinan di Indonesia Tahun 2006 – 2008 (Dalam Rp)**

| Tahun* | Garis Kemiskinan (Rp/kapita/bulan) |         |             |
|--------|------------------------------------|---------|-------------|
|        | Kota                               | Desa    | Kota + Desa |
| 2006   | 174.290                            | 130.584 | 151.997     |
| 2007   | 187.942                            | 146.837 | 166.697     |
| 2008   | 204.896                            | 161.636 | 182.636     |

Sumber: Data Susenas; diolah

Keterangan: \* Data diambil pada bulan Maret tiap tahunnya

Di Indonesia sendiri memiliki wilayah yang luas yang terdiri atas 33 propinsi. Dengan luasnya wilayah ini membuat persebaran penduduk dan masalah kemiskinan tiap daerahnya berbeda-beda. Propinsi Nusa Tenggara Timur adalah salah satu daerah dengan tingkat kemiskinan yang cukup tinggi. Namun, dalam perkembangannya tingkat kemiskinan yang ada di propinsi NTT ini telah mengalami penurunan dari tahun ke tahun. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat dalam tabel 1.3 berikut ini:

**Tabel 1.3**  
**Perkembangan Kemiskinan di Propinsi Nusa Tenggara Timur**  
**Tahun 2007– 2008**

| Tahun | Presentase penduduk miskin<br>(dalam persen) |       |             | Jumlah Penduduk miskin<br>(dalam ribu orang) |        |             |
|-------|--|-------|-------------|--|--------|-------------|
|       | Kota   | Desa  | Kota + Desa | Kota   | Desa   | Kota + Desa |
| 2007  | 16,41  | 29,95 | 27,51       | 124,9  | 1038,7 | 1163,6      |
| 2008  | 15,50  | 27,88 | 25,65       | 119,3  | 979,1  | 1.098,3     |

Sumber: BPS, Statistik Indonesia (Susenas) ; diolah

Berdasarkan tabel 1.3 tersebut, perkembangan kemiskinan di propinsi NTT mengalami penurunan jumlah penduduk miskin dari tahun 2006 sampai tahun 2008. Tahun 2007 jumlah penduduk miskin propinsi NTT adalah 1163,6 ribu orang (27,51 %), dengan penduduk miskin perkotaan sebanyak 124,9 ribu orang (16,41 %) dan desa 1038,7 ribu orang (29,95 %). Turun menjadi 1.098, 3 ribu orang (25,65 %) pada tahun 2008, dengan jumlah penduduk miskin perkotaan 119, 3 ribu orang (15,50 %) dan desa 979,1 ribu orang (27,88 %).

Penurunan kemiskinan di propinsi NTT ini tidaklah terlalu ekstrim. Namun, kalau melihat dari segi indeks pembangunan manusia propinsi NTT yang berada pada peringkat ketiga terendah di Indonesia dari 33 propinsi yang ada bisa dikatakan bahwa perhatian pemerintah terhadap pembangunan manusia di wilayah NTT masih rendah. Secara umum dapat dilihat dalam Tabel 1.4 berikut ini:

**Tabel 1.4**  
**Perkembangan Indeks Pembangunan Manusia Indonesia dan Propinsi NTT**  
**Tahun 2005 – 2008**

| Tahun | Indeks Pembangunan Manusia (IPM) |          |               |
|-------|----------------------------------|----------|---------------|
|       | Indonesia                        | Propinsi |               |
|       |                                  | NTT      | Peringkat IPM |
| 2004  | 68,7                             | 62,7     | 31            |
| 2005  | 69,57                            | 63,59    | 31            |
| 2006  | 70,10                            | 64,83    | 31            |
| 2007  | 70,59                            | 65,36    | 31            |
| 2008  | 71,17                            | 66,15    | 31            |

Sumber: Indeks Pembangunan Manusia; BPS 2009

Berdasarkan tabel 1.4 dapat dikatakan dari segi peringkat propinsi NTT dari tahun 2004 sampai 2008 tetap yaitu peringkat 31. Namun, ini tidak mendorong indeks pembangunan manusia propinsi NTT tetap rendah. Indeks pembangunan manusia ini tetap mengalami kenaikan, tahun 2004 sebesar 62,7 meningkat menjadi 66,15 pada tahun 2008.

Secara keseluruhan Indeks Pembangunan Manusia di propinsi NTT sangatlah beragam antar kabupatennya. Ada yang masih di bawah rata-rata IPM propinsi dan juga ada yang sudah di atas rata-rata IPM propinsi. Namun, secara keseluruhan masih di bawah rata-rata IPM nasional. Salah satunya adalah Kabupaten Flores Timur.

Kabupaten Flores Timur merupakan salah satu dari 21 kabupaten/kota di propinsi Nusa Tenggara Timur yang memiliki IPM yang baik. IPM di Kabupaten Flores timur sendiri juga mengalami kenaikan dari tahun ke tahun. Kenaikannya juga sangat baik dari tahun 2005 sampai tahun 2008. Di tahun 2005 IPM kabupaten Flores Timur sebesar 64,7 meningkat menjadi 67,1 pada tahun 2008. Untuk lebih jelas dapat di lihat dalam Tabel 1.5 di bawah ini.

**Tabel.1.5**  
**Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Flores Timur**  
**Tahun 2005 – 2008**

| <b>Tahun</b> | <b>Indeks Pembangunan Manusia</b> |
|--------------|-----------------------------------|
| 2005         | 64,7                              |
| 2006         | 66,4                              |
| 2007         | 66,7                              |
| 2008         | 67,1                              |

Sumber: diolah NTT dalam angka; BPS 2009

Di Kabupaten Flores Timur sendiri selain indeks pembangunan manusianya yang membaik. Terdapat juga peningkatan pendapatan per kapita penduduk Kabupaten Flores Timur. Pada tahun 2005 Pendapatan Perkapita Kabupaten Flores Timur mencapai Rp. 3.378.242 terus meningkat menjadi Rp. 4.042.817 pada tahun 2007, kemudian melambat menjadi Rp. 4.515.673. Walaupun meningkat tetapi perubahan peningkatannya berfluktuasi. Pada tahun 2005 perubahan peningkatan pendapatan perkapita sebesar 36,02 persen turun menjadi 10,35 persen pada tahun 2006, dan turun lagi pada tahun 2007 menjadi 8,45 persen, kemudian pada tahun 2008 kembali naik menjadi 11,70 persen. Ini dapat ditunjukkan pada Tabel 1.6 di bawah ini.

**Tabel.1.6**  
**Rata-Rata Pendapatan Perkapita Penduduk Kabupaten Flores Timur**  
**Tahun 2005 – 2008**

| <b>Tahun</b>        | <b>Pendapatan perkapita (Rp.)</b> | <b>% perubahan</b> |
|---------------------|-----------------------------------|--------------------|
| 2005                | 3.378.242                         | 36,02              |
| 2006                | 3.727.739                         | 10,35              |
| 2007 <sup>*)</sup>  | 4.042.817                         | 8,45               |
| 2008 <sup>**)</sup> | 4.515.673                         | 11,70              |

Sumber: Flores Timur dalam angka, BPS

Keterangan : <sup>\*)</sup> Angka Sementara

<sup>\*\*)</sup> Angka sangat sementara

Selain pendapatan per kapita dan IPM yang membaik perkembangan penduduk miskin Kabupaten Flores Timur juga menurun. Berdasarkan data tahun 2008 jumlah penduduk miskin Kabupaten Flores Timur adalah 80.035 jiwa dengan total

rumah tangga miskin adalah 20.086 rumah tangga. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat dalam Tabel 1.7 berikut:

**Tabel.1.7**  
**Jumlah Penduduk dan Rumah Tangga terhadap Jumlah Penduduk Miskin dan Rumah Tangga Miskin Kabupaten Flores Timur Tahun 2008**

| Kecamatan      | Penduduk | Rumah Tangga | Penduduk Miskin | Rumah Tangga Miskin |
|----------------|----------|--------------|-----------------|---------------------|
| Larantuka      | 33.882   | 7.244        | 11.388          | 2.432               |
| Adonara        | 9.873    | 2.503        | 3.058           | 797                 |
| Kelubagolit    | 10.276   | 3.260        | 1.512           | 837                 |
| Witihama       | 14.538   | 4.328        | 5.012           | 1.105               |
| Ileboleng      | 14.480   | 4.329        | 5.794           | 1.528               |
| Adonara Timur  | 26.699   | 6.452        | 8.647           | 1.986               |
| Adonara Tengah | 11.477   | 2.666        | 3.512           | 780                 |
| Wotan Ulomado  | 8.056    | 1.888        | 1.273           | 425                 |
| Adonara Barat  | 11.545   | 2.532        | 2.756           | 793                 |
| Solor Timur    | 14.514   | 3.740        | 6.328           | 1.487               |
| Solor Barat    | 12.962   | 3.171        | 7.429           | 1.598               |
| Demon Pagong   | 4.367    | 1.078        | 2.437           | 587                 |
| Ile Mandiri    | 9.256    | 2.102        | 1.603           | 427                 |
| Lewolema       | 8.275    | 1.808        | 1.985           | 511                 |
| Tanjung Bunga  | 11.584   | 2.506        | 3.827           | 925                 |
| Ilebura        | 6.230    | 1.497        | 2.774           | 626                 |
| Titehena       | 11.864   | 2.950        | 6.128           | 1366                |
| Wulanggan      | 13.057   | 2.906        | 4.572           | 976                 |
| Flores Timur   | 232.935  | 56.960       | 80.035          | 20.086              |

Sumber: diolah Flores Timur dalam angka; BPS 2009

Berdasarkan Tabel 1.7 tersebut maka Kabupaten Flores Timur memiliki jumlah penduduk pada tahun 2008 adalah 232.935 jiwa dengan 56.960 rumah tangga. Jumlah penduduk terbanyak adalah Kecamatan Larantuka 33.882 jiwa (7.244 rumah tangga) dan yang terendah adalah Kecamatan Ilebura sebanyak 6.230 jiwa (1.497 rumah tangga). Selain itu, untuk penduduk miskin terbanyak terdapat di kecamatan Larantuka sebanyak 11.388 jiwa (2.432 rumah tangga). Sedangkan untuk jumlah penduduk miskin terendah terdapat pada Kecamatan Wotan Ulomado yaitu sebanyak 1.273 jiwa (425 rumah tangga).

Di Kecamatan Larantuka, khususnya Kelurahan Lokea terdapat 8 RT dan 4 RW, dan berdasarkan data tahun 2008 jumlah penduduk Kelurahan Lokea adalah 1.657 orang dengan banyaknya rumah tangga adalah 362 rumah tangga dengan rata-rata anggota rumah tangganya adalah 5 orang. Selain itu, berdasarkan data penerima Bantuan Langsung Tunai (BLT) tahun 2008, keluarga miskin Kelurahan Lokea adalah sebanyak 67 rumah tangga dengan 321 orang. Di kelurahan Lokea juga memiliki mata pencaharian penduduknya yang beranekaragam. Beraneka ragam mata pencaharian ini telah mengakibatkan perbedaan dari segi pendapatan masyarakatnya, sehingga pola distribusi pendapatannya berbeda-beda.

## **1.2. Rumusan Masalah**

Dalam penelitian ini akan menganalisa pendapatan masyarakat pedesaan. Bagaimana pendapatan dalam masyarakat tersebut terdistribusikan dan bagaimana tingkat kemiskinan serta indeks pembangunan manusia di daerah penelitian, yang dirumuskan dalam topik sebagai berikut: “ Pola Distribusi Pendapatan Dan Kemiskinan Pada Masyarakat Pedesaan (Studi Kasus di Kelurahan Lokea, Kecamatan Larantuka, Kabupaten Flores Timur, Nusa Tenggara Timur) 2009.

## **1.3. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka penelitian ini bertujuan:

- 1) Untuk melihat pola distribusi pendapatan masyarakat pedesaan di Kelurahan Lokea.



- 2) Untuk melihat pola distribusi pengeluaran masyarakat pedesaan di Kelurahan Lokea.
- 3) Untuk melihat kemiskinan pada masyarakat pedesaan di Kelurahan Lokea.
- 4) Untuk melihat indeks pembangunan manusia pada masyarakat pedesaan di Kelurahan Lokea.

#### **1.4. Manfaat Penelitian**

Dengan melakukan penelitian ini maka diharapkan dapat diperoleh manfaat sebagai berikut:

1) Bagi pemerintah daerah

Pemerintah dapat menentukan kebijakan mana yang ditempuh untuk meningkatkan pendapatan daerah khususnya di wilayah Kelurahan Lokea, Kecamatan Larantuka, Kabupaten Flores Timur, Nusa Tenggara Timur.

2) Bagi masyarakat umum

Manfaat yang bisa dirasakan oleh masyarakat umum adalah dapat mengetahui dengan jelas faktor-faktor yang mempengaruhi pendapatan daerah.

3) Bagi peneliti

Sebagai pertanggungjawaban ilmiah dalam meraih gelar Sarjana Ekonomi Jurusan Ilmu Ekonomi di Fakultas Ekonomi, Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

#### **1.5. Studi Terkait**

Subardjo (1997) melakukan studi mengenai *Stratifikasi Kemiskinan Dan*

*distribusi Pendapatan Di Wilayah Pedesaan*. Penelitiannya dilakukan pada tiga dusun di wilayah selatan gunung Merapi, yakni Dusun Turgo, dusun Ngepring, dan Dusun Watuadeg pada Desa Purwobinangun, Kecamatan Pakem, Kabupaten Sleman, Daerah istimewa Yogyakarta. Dalam studi ini ditemukan bahwa tingkat kemiskinan tidak hanya ditentukan oleh ketersediaan sumberdaya alam maupun tingkat aksesibilitas, melainkan juga tergantung kemampuan penduduk untuk memanfaatkan keunggulan komparatif sumberdaya setempat untuk berbagai kegiatan ekonomi. Selain itu, peranan *off-farm* dalam distribusi pendapatan tidak selamanya positif. Dalam keadaan sumberdaya dan kesempatan berusaha terbuka sama luasnya antar berbagai lapisan masyarakat, pekerjaan *off-farm* memang memiliki kinerja yang baik untuk distribusi pendapatan. Sementara itu jika penguasaan sumberdaya baik berupa lahan maupun modal menjadi faktor penentu pendapatan dari kegiatan *off-farm*, maka kegiatan tersebut akan memperburuk distribusi pendapatan.

Cahyono, Jariyah dan Nugroho (2002) melakukan penelitian tentang *Distribusi Pendapatan Rumah Tangga Petani di SUB DAS Keduang*. Penelitian dilakukan pada enam desa di Sub Daerah Aliran Sungai (DAS) Keduang. Desa-desanya tersebut adalah Desa Gemawang Kecamatan Ngadirojo, Desa Sanggrong dan Duren Kecamatan Jatiroto, Desa Kebonagung Kecamatan Sidoarjo, Desa Sambirejo dan Jatisrono Kecamatan Jatisrono. Data penelitian yang dipergunakan pada penelitian ini bersumber dari data Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Daerah Aliran Sungai aspek sosial ekonomi yang dilakukan oleh BP2TP DAS Surakarta. Hasil survey Monitoring dan Evaluasi (Monev) diperoleh sebanyak 104 responden yang berasal dari Sub DAS Keduang. Tujuan penelitiannya sendiri untuk melihat besarnya pendapatan petani di Sub DAS Keduang,

mengetahui ketergantungan petani terhadap lahan dan melihat distribusi pendapatan petani di sub DAS Keduang. Hasil penelitian yang di dapat berupa pendapatan petani masih di dominasi oleh pertanian, yang terlihat dengan kontribusi pendapatan yang berasal dari sektor pertanian mencapai 59,11% dari pendapatan total. Kontribusi ini semakin besar pada petani berlahan luas yang mencapai 84,09%. Berdasarkan kriteria Monev DAS maka secara rata-rata ketergantungan petani terhadap lahan tergolong sedang, sedangkan petani berlahan luas tergolong baik dengan ketergantungan terhadap lahan melebihi 75%. Di lihat dari ketimpangan distribusi perusahaan lahan tergolong rendah (0,2371) dan ketimpangan distribusi pendapatan rumah tangga tergolong tinggi (0,4966). Kegiatan di luar pertanian dan non lahan merupakan usaha yang memiliki ketimpangan distribusi pendapatan tinggi.

Hesmati (2004) melakukan studi tentang *Regional Income Inequality In Selected Large Countries*. Dengan melihat perbedaan distribusi pendapatan dan juga perbedaan pendapatan daerah pada negara-negara besar yakni China, Rusia, India dan USA. Dan juga melihat pendapatan daerah pada Negara-negara yang kecil seperti halnya Colombia, Indonesia, Philipina, Afrika Selatan, Zambia dan Polandia. Dalam penelitiannya ditemukan bahwa di China adanya korelasi yang positif antara pertumbuhan dan perbedaan wilayah. Tingkatan dalam pembangunan ditentukan dengan perbedaan pada letak geografis, pembangunan dalam berbagai sektor, perbedaan jarak yang merupakan identifikasi dari model determinan. Rusia ditemukan kacamata kemiskinan yang disebabkan oleh beraneka ragam pembangunan ekonomi, ukuran wilayah, etnis, dan perbedaan antar daerah yang berdasarkan perbedaan pendapatan antar daerahnya. India ditemukan kemiskinan sebagai suatu faktor dalam menghambat pendapatan di masing-

masing daerah. USA ditemukan migrasi, keterampilan, teknologi, gender, mengubah karakteristik rumah tangga mampu meningkatkan pendapatan suatu daerah. Selain itu juga adanya ras, pendidikan, umur, serta status perkawinan dapat mempengaruhi kemiskinan.

Hariadi, Arintoko dan Bawono (2008) melakukan studi tentang *Ketimpangan Distribusi Pendapatan Di Kabupaten Banyumas Jawa Tengah*. Penelitian ini ingin melihat ketimpangan distribusi pendapatan yang ada di kabupaten Banyumas dan penyebabnya. Penelitian ini dilakukan di wilayah kecamatan di kabupaten Banyumas dengan sampel adalah rumah tangga yang ditentukan berdasarkan karakteristik wilayah yang ada dengan pertimbangan 3 kelompok wilayah kecamatan tersebut adalah kecamatan kota (*urban*), kecamatan di dekat atau pinggiran kota (*suburban*) dan kecamatan di wilayah pedesaan (*rural*). Dari penelitian ini ditemukan bahwa penyebab ketimpangan distribusi pendapatan di kabupaten Banyumas adalah turunnya kontribusi sektor pertanian, rendahnya pendapatan petani, turunnya daya beli bagi petani, usaha kecil dan rumah tangga, kurang memadainya sektor informal dalam memberikan hasil dan pendapatan bagi pelaku sektor informal akibat biaya modal dan produksi serta rendahnya permintaan akibat turunnya pendapatan riil masyarakat karena inflasi. Selain itu juga, karena adanya polarisasi perolehan pendapatan antara kelompok masyarakat berpendapatan terendah. Dari segi distribusi pendapatan ditemukan bahwa terjadi kecenderungan kenaikan ketimpangan distribusi pendapatan antar rumah tangga di Kabupaten Banyumas.

## 1.6. Definisi Operasional

Definisi operasional dalam penelitian ini dapat dijabarkan sebagai berikut:

1. Pendapatan masyarakat yang akan dianalisis dalam penelitian ini adalah keseluruhan pendapatan yang berasal dari segala aktivitas mata pencahariannya. Pendapatan ini di lihat berdasarkan pendapatan per kapita kepala keluarganya. Dengan cara diestimasi pendapatan per kapitanya. Pendapatan per kepala keluarga di peroleh dengan membagi keseluruhan total pendapatan responden dengan jumlah sampel yaitu rata-rata pendapatan per kapita di estimasi dengan membagi keseluruhan total pendapatan responden dengan jumlah beban tanggungan termasuk responden itu sendiri.
2. Pola distribusi pendapatan adalah bagaimana keseluruhan pendapatan responden dapat terdistribusi di lihat dengan merengking pendapatan masing-masing responden dari yang pendapatannya tertinggi hingga pendapatan terendah. Setelah memperoleh rangking pendapatan responden, kemudian membagi rangking tersebut menjadi tiga kelompok yaitu:
  - a. 20 % responden dengan pendapatan tertinggi, yang selanjutnya di kelompokkan dalam 20 % atas ("*Top 20 %*").
  - b. 40 % responden dengan pendapatan menengah, yang selanjutnya disebut kelompok 40 % menengah ("*Middle 40 %*").
  - c. 40 % responden dengan pendapatan terendah, yang selanjutnya disebut kelompok 40 % bawah ("*Buttom 40 %*").
3. Mata pencaharian adalah: pekerjaan yang dikerjakan oleh responden yang menghasilkan pendapatan.

4. Pengeluaran adalah keseluruhan dari pendapatan masyarakat yang dipakai oleh responden untuk pemenuhan kebutuhan dan juga di tabung.

Pengeluaran ini dapat berupa: konsumsi untuk kegiatan produksi, konsumsi bahan makanan, konsumsi pakaian, konsumsi alat-alat rumah tangga, pemeliharaan alat, biaya pendidikan, biaya kemasyarakatan (arisan, iuran pembangunan) dan juga kebutuhan yang tak terduga.

5. Penduduk miskin adalah jumlah keseluruhan dari populasi dengan pengeluaran perkapita berada di bawah garis kemiskinan.

Garis kemiskinan dilihat berdasarkan pengeluaran perkapita setiap bulannya dalam memenuhi standar minimum kebutuhan-kebutuhan konsumsi makanan dan non makanan yang dibutuhkan oleh seseorang untuk hidup.

6. Pembangunan Manusia merupakan capaian suatu daerah dalam pembangunan kualitas hidup manusia yang dilihat berdasarkan harapan hidup, tingkat kemampuan membaca orang dewasa, rata-rata lama sekolah penduduk usia sekolah dan kemampuan daya beli.

## **1.7. Metode Penelitian**

### **1.7.1 Data**

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer, yaitu data yang berdasarkan cara memperolehnya dilakukan oleh pihak peneliti secara langsung terhadap objek yang diamati. Disamping itu, juga digunakan data sekunder yang berasal dari instansi, lembaga, departemen pemerintah, dan juga studi kepustakaan yang sesuai dengan tujuan penelitian ini.

### 1.7.2 Sampel

Sampel dalam penelitian ini adalah penduduk di RW 01, RW 02, RW 03, dan RW 04 Kelurahan Lokea, Kecamatan Larantuka, Kabupaten Flores Timur, Nusa Tenggara Timur. Pengambilan sampelnya secara acak yakni dengan pembagian sampel ditetapkan sebesar 140 rumah tangga. Di mana diambil 35 rumah tangga pada masing-masing RW.

### 1.7.3 Teknik Pengambilan data

Data primer dalam penelitian ini diperoleh dengan melakukan wawancara secara langsung terhadap responden. Pemilihan responden/sampel dengan menggunakan teknik *Purposive Random Sampling*, yaitu berdasarkan penilaian peneliti bahwa dia adalah pihak yang baik untuk dijadikan sampel penelitian.

### 1.7.4 Lokasi dan Waktu Penelitian

Lokasinya sendiri berada pada RW 01, RW 02, RW 03 dan RW 04, Kelurahan Lokea, Kecamatan Larantuka, Kabupaten Flores Timur, Nusa Tenggara Timur. Waktu pengambilan sampel sendiri waktu pengambilan sampel penelitian adalah pada bulan Desember 2009 sampai dengan Januari 2010.

### 1.7.5 Alat Analisis

#### 1.7.5.1 Indeks Gini

Secara matematis rumus Koefisien Gini dapat disajikan sebagai berikut (Arsyad, 2004; 232-233):

$$KG = 1 - \sum_{i=1}^n f_i (Y_{i+1} + Y_i)$$

Di mana:

KG = Angka Koefisien gini

$X_i$  = Proporsi jumlah rumah tangga kumulatif dalam kelas  $i$

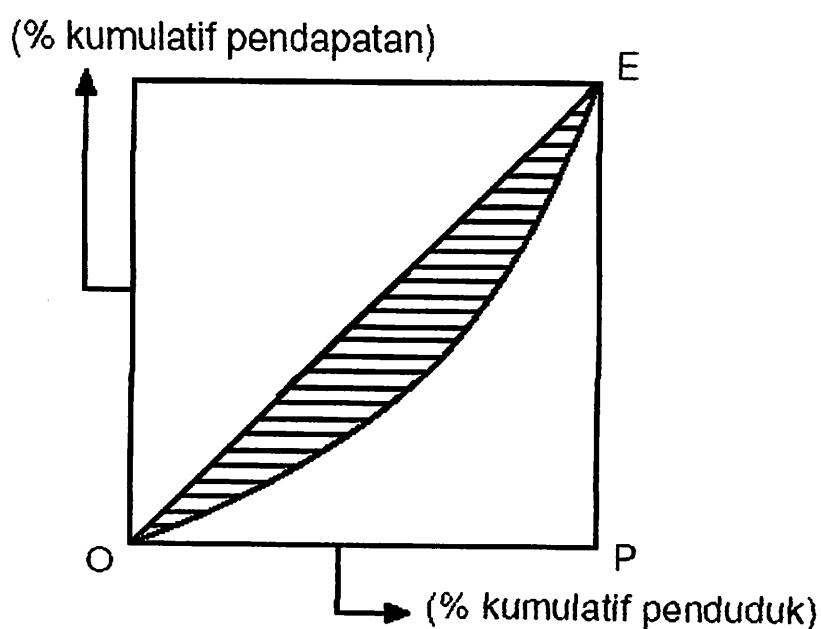
$f_i$  = Proporsi jumlah rumah tangga dalam kelas  $i$

$Y_i$  = Proporsi jumlah pendapatan rumah tangga kumulatif dalam kelas  $i$

Koefisien Gini merupakan ukuran ketidakmerataan agregat dan nilainya terletak antara nol (kemerataan sempurna) sampai satu (ketidakmerataan sempurna). Koefisien Gini dari negara-negara yang mengalami **ketidakmerataan tinggi** berkisar antara **0,50 – 0,70**; **ketidakmerataan sedang** berkisar antara **0,36 – 0,49**; dan yang mengalami **ketidakmerataan rendah** berkisar antara **0,20 – 0,35** (Arsyad, 2004; 232-233).

#### 1.7.5.2 Kurva Lorenz

**Gambar 1.1**  
**Kurva Lorenz**



Sumber: <http://www.e-dukasi.net>



Kurva Lorenz menunjukkan hubungan kuantitatif *aktual* antara persentase penerima pendapatan dengan persentase pendapatan total yang benar-benar mereka terima selama, misalnya satu tahun (Todaro dan Smith, 2004; 223). Semakin jauh Kurva Lorenz tersebut dari garis diagonal (kemerataan sempurna), semakin tinggi derajat ketidakmerataan yang ditunjukkan, dan sebaliknya jika semakin mendekati garis kemerataan sempurna maka semakin rendah derajat ketidakmerataannya.

#### 1.7.5.3 Kemiskinan

Dalam penelitian ini ukuran kemiskinan akan dilihat melalui kemiskinan absolut (*absolute poverty*). Konsep tentang kemiskinan absolut untuk menentukan tingkat pendapatan minimum yang cukup untuk memenuhi kebutuhan fisik dasar akan makanan, pakaian, dan perumahan agar dapat menjamin kelangsungan hidupnya (Todaro, 2006; 67).

#### 1.7.5.4 Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Menurut UNSFIR (2000) Indeks Pembangunan Manusia (IPM) atau juga disebut *Human Development Index* (HDI) dapat dihitung dengan membandingkan perbedaan antara nilai indikator dan penentu nilai minimumnya dengan perbedaan antara penentu indikator maksimum dan minimum, atau secara singkat dapat dituliskan sebagai berikut (Kuncoro, 2006; 30):

$$\text{Indeks } X_{(i)} = [ X_{(i)} - X_{(i) \min} ] / [ X_{(i) \max} - X_{(i) \min} ]$$

Di mana:

$X_{(i)}$  : Indikator ke-i ( $i=1,2,3$ );  $X_{(i) \max}$  : nilai maksimum  $X_{(i)}$ ,  $X_{(i) \min}$  : nilai minimum  $X_{(i)}$ .

Berdasarkan prosedur di atas, maka HDI dapat dihitung dengan persamaan berikut ini :

$$\text{HDI} = 1/3 [ X(1) + X(2) + X(3) ]$$

Di mana:  $X_{(1)}$  = Indeks harapan hidup kelahiran

$X_{(2)}$  = Indeks pendidikan =  $2/3$  (indeks melek huruf) +  $1/3$  (indeks rata-rata lama sekolah)

$X_{(3)}$  = Indeks standar hidup layak.

Besarnya HDI antara 0 sampai dengan 1,0. Semakin mendekati 1 maka indeks pembangunan manusianya tinggi, demikian sebaliknya (Arsyad, 2004; 38).

### **1.8. Sistematika Penulisan**

#### **BAB I PENDAHULUAN**

Pendahuluan menguraikan latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, studi terkait, definisi operasional, metodologi penelitian serta sistematika penulisan.

#### **BAB II LANDASAN TEORI**

Landasan teori membahas mengenai teori-teori yang digunakan sebagai acuan atau landasan dalam penelitian ini serta penjelasan tentang alat analisis yang digunakan.

#### **BAB III GAMBARAN UMUM**

Gambaran umum memberikan uraian mengenai daerah penelitian.

#### **BAB IV ANALISIS DATA**

Menguraikan tentang pembahasan hasil pengolahan data dan analisis yang dilakukan mengenai pola distribusi pendapatan, Indeks Gini, Kurva Lorenz, pola distribusi pengeluaran, tingkat kemiskinan dan juga Indeks Pembangunan Manusia di wilayah penelitian. Selain itu, juga di jelaskan tentang struktur umur dan beban tanggungan responden, struktur umur dan pendidikan, serta beban tanggungan, struktur

pekerjaan responden, kondisi dan status kepemilikan rumah responden pada wilayah penelitian.

## **BAB V KESIMPULAN DAN SARAN**

Menguraikan kesimpulan yang diperoleh dari penelitian sekaligus memberikan saran sebagai masukan bagi pihak-pihak terkait.